

Studi tentang kemiskinan di Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Muaro Jambi

Deyra Qatrunnada Nasution; Yulmardi; Hardiani*

Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi

*E-mail Korespondensi : hardiani@unja.ac.id

Abstract

The study aims to analyze: 1) the development of poverty levels, the poverty gap index and the poverty severity index in Batang Hari Regency and Muaro Jambi Regency; 2) differences in poverty levels, poverty gap index and poverty severity index between Batang Hari Regency and Muaro Jambi Regency. The data used are secondary data for the period 2002 - 2016, sourced from the Central Bureau of Statistics of Batang Hari Regency and Muaro Jambi Regency. Data were analyzed descriptively and used the Independent Sample T-test. The results of this study found that the average poverty rate in Batang Hari Regency during the period 2002 - 2016 was 13.37%, the poverty gap index was 1.87%, and the poverty severity index was 0.44%. In the same period, the average poverty rate in Muaro Jambi District was 6.51%, with the poverty gap index of 0.82%, and the poverty severity index of 0.17%. There were significant differences in poverty levels, the poverty gap index and the poverty severity index between Batang Hari District and Muaro Jambi District.

Keywords : Poverty rate, Poverty gap index, Poverty severity index

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: 1) perkembangan tingkat kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Muaro Jambi; 2) perbedaan tingkat kemiskinan, indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan antara Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Muaro Jambi. Data yang digunakan adalah data sekunder periode Tahun 2002 – 2016, yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Muaro Jambi. Data dianalisis secara deskriptif dan menggunakan uji beda *Independent Sample T-test*. Hasil penelitian ini menemukan bahwa rata-rata tingkat kemiskinan di Kabupaten Batang Hari selama periode Tahun 2002 – 2016 adalah sebesar 13,37%, Indeks Kedalaman Kemiskinan sebesar 1,87%, dan Indeks Keparahannya sebesar 0,44%. Pada periode yang sama, rata-rata tingkat kemiskinan di Kabupaten Muaro Jambi sebesar 6,51%, dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan sebesar 0,82%, dan Indeks Keparahannya sebesar 0,17%. Terdapat perbedaan yang signifikan tingkat kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan antara Kabupaten Batang Hari dengan Kabupaten Muaro Jambi.

Kata kunci: Tingkat Kemiskinan, Indeks kedalaman kemiskinan, dan Indeks keparahan kemiskinan

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional. Masalah kemiskinan ini terus menjadi masalah di semua negara, khususnya Indonesia yang merupakan negara berkembang. Gonner (2007) mengemukakan bahwa kemiskinan dimaknai sebagai "kurangnya kesejahteraan" dan "kesejahteraan sebagai kurangnya kemiskinan". Artinya kemiskinan diterjemahkan sebagai menurunnya kesejahteraan. Keduanya saling terkait dan memandang masalah yang sama dari dua dimensi yang berbeda. Definisi yang luas dari kemiskinan ini adalah "kurangnya kesejahteraan", dimana ada saling tukar dalam konsep ini (Case & Fair, 2010). Misalnya apabila masyarakat sangat kurang sejahtera, berarti masyarakat miskin. Disisi lain, apabila mereka berada dalam kondisi yang sangat sejahtera, maka hidupnya ditandai dengan kemakmuran, kebahagiaan dan kepuasan (Albornoz, 2007). Menurut Kuncoro (2000), negara yang miskin karena kebijakan yang miskin yang ada di dalamnya.

Pemerintah baik pusat maupun daerah telah berupaya dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan. Namun kebijakan dan program yang dilaksanakan belum menampakkan hasil yang optimal. Masih terjadi kesenjangan antara rencana dengan pencapaian tujuan karena kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan lebih berorientasi pada program sektoral. Oleh karena itu diperlukan suatu strategi penanggulangan kemiskinan yang terpadu, terintegrasi dan sinergis sehingga dapat menyelesaikan masalah secara tuntas. Menurut Simatupang dan Sakatyanu (2003) pembangunan harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan akar dan sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui jangka panjang dan jangka pendek. Strategi penanggulangan kemiskinan masih harus terus menerus selalu dikembangkan.

Sebagai dampak dari otonomi daerah, beberapa kabupaten di Provinsi Jambi telah mengalami pemekaran. Salah satunya adalah Kabupaten Batang Hari. Berdasarkan UU. No. 54 tahun 1999, Kabupaten Batang Hari dimekarkan menjadi Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Muaro Jambi dan secara defacto kegiatan efektif berjalan terhitung tanggal 12 Oktober 1999. Meskipun demikian, jika dilihat dari tingkat kemiskinannya terdapat perbedaan yang cukup nyata. tingkat kemiskinan Kabupaten Batang Hari mencapai rata-rata sebesar 13,37 persen selama periode Tahun 2002 – 2016, sedangkan pada periode yang sama tingkat kemiskinan Kabupaten Muaro Jambi hanya 6,51 persen. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini tertarik untuk menganalisis kemiskinan dan perbedaan kemiskinan antara Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Muaro Jambi sebagai wilayah pemekaran.

TINJAUAN PUSTAKA

Kemiskinan bukanlah fenomena yang baru di dalam kehidupan sosial. Ia merupakan fenomena sosial yang selalu menjadi atribut-atribut negara-negara dunia ketiga. Fenomena ini juga merupakan kebalikan dari kondisi yang dialami oleh negara-negara maju yang memiliki atribut sebagai negara modern. Jika diamati, seolah-olah kemiskinan identik dan selalu melekat di dalam struktur negara-negara dunia ketiga dan menjadi problem yang cukup serius untuk mendapatkan penanganan dari pada penyelenggara negara. Telah banyak upaya yang dilakukan oleh para penyelenggara negara untuk mengentaskan kemiskinan sulit dicari penyelesaiannya.

Pada dasarnya kemiskinan didefinisikan dengan taraf hidup yang rendah, dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana penghidupan penduduk ditandai oleh serba

kekurangan akan kebutuhan pokok. Secara etimologis “kemiskinan” berasal dari kata “miskin” yang artinya tidak berharta benda dan serba kekurangan. Departemen sosial dan Badan Pusat Statistik mendefinisikan kemiskinan dari perspektif kebutuhan dasar. Kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal hidup layak (BPS, 2012).

Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Kemiskinan berbeda dengan ketimpangan distribusi pendapatan (*inequality*). Perbedaan ini sangat perlu ditekankan. Kemiskinan berkaitan erat dengan standar hidup yang absolut dari bagian masyarakat tertentu, sedangkan ketimpangan mengacu pada standar hidup relatif dari seluruh masyarakat. Pada tingkat ketimpangan yang ekstrim, kekayaan yang dimiliki oleh satu orang saja, dan tingkat kemiskinan yang sangat tinggi (Kuncoro, 2010).

Menurut Suharto (2010) konsep kemiskinan dengan demikian mempunyai definisi yang variatif berdasarkan ragam paradigma, dimensi yang terukur berdasarkan aspek-aspek dan indikator yang menyertainya. Sehingga konsep kemiskinan secara utuh dapat diterjemahkan dengan memperhatikan beberapa keberfungsian dalam studi kemiskinan, antara lain:

1. Kemiskinan setidaknya tidak diterjemahkan dari aspek karakteristik subyektifitas si miskin secara statis, melainkan dilihat secara dinamis yang menyangkut usaha dan kemampuan si miskin dalam merespon kemiskinannya, termasuk efektifitas jaringan sosial (lembaga kemasyarakatan dan program-program anti kemiskinan setempat) dalam menjalankan fungsi sosial.
2. Kemiskinan hendaknya tidak didefinisikan sebagai ukuran indikator tunggal, melainkan indikator komposit dengan unit analisis keluarga atau rumah tangga dengan jaringan sosial yang ada disekitarnya.
3. Konsep kemampuan sosial dipandang lebih lengkap menerjemahkan teori kemiskinan dari pada konsep pendapatan dalam memotret sekaligus dinamika kemiskinan.
4. Kemiskinan seharusnya dapat diterjemahkan dengan difokuskan pada pengukuran kemampuan sosial keluarga miskin dengan mencakup: kemampuan keluarga miskin memperoleh mata pencaharian, memenuhi kebutuhan dasar, mengelola aset, menjalankan sumber-sumber, berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan, serta kemampuan dalam menghadapi guncangan dan tekanan. Sedangkan indikator kunci untuk mengukur jaringan sosial dapat mencakup lembaga-lembaga sosial memperoleh sumberdaya (SDM dan finansial), menjalankan peran atau fungsi utamanya, mengelola aset menjangkau sumberdaya, berpartisipasi dalam program anti kemiskinan.

Kuznets dalam Jhingan (2008) mengusulkan tiga definisi tentang keterbelakangan. Pertama, istilah itu dapat berarti kegagalan memanfaatkan secara penuh potensi produktif dengan menggunakan tingkat pengetahuan teknologi yang ada. Kedua, berarti keterbelakangan dalam kinerja (*performance*) ekonomi dibandingkan dengan daerah atau negara lain dalam periode yang sama. Ketiga, ia dapat berarti kemiskinan ekonomi, dalam arti kegagalan menyediakan biaya hidup yang memadai dan harta benda yang dapat memuaskan sebagian besar penduduk.

Menurut Todaro (2016) kemiskinan sering dipahami dengan rendahnya tingkat kesejahteraan semata, tetapi kemiskinan merupakan masalah yang bersifat kompleks dan multidimensi. Artinya, kemiskinan berkaitan satu sama lain dengan berbagi macam dimensi kebutuhan manusia. Hal tersebut dikarenakan kebutuhan manusia bermacam-macam, maka kemiskinan memiliki banyak aspek. Kemiskinan meliputi

aspek primer yang berupa miskin akan aset, organisasi politik, dan pengetahuan serta keterampilan. Selanjutnya aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah (Arsyad, 2015).

Pengeluaran kemiskinan dilakukan melalui usaha-usaha penetapan garis kemiskinan dengan menggunakan kriteria tertentu ditetapkan garis kemiskinan yang selanjutnya proporsi penduduk dibawah garis ini digolongkan penduduk miskin. Secara umum ada 2 macam ukuran kemiskinan yang bisa digunakan yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif.

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang berkaitan dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan yang terbatas pada kebutuhan pokok sehingga orang tersebut dapat disebut hidup dengan layak. Kemiskinan absolut diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan seseorang dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk mendapatkan kebutuhan dasarnya tersebut dengan tujuan kelangsungan hidupnya. Dengan demikian, seseorang dikatakan miskin absolut apabila pendapatan yang diperolehnya kurang dari garis kemiskinan dan tidak mampu mencukupi kebutuhan pokoknya.

2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif dilihat dari aspek ketimpangan sosial. Apabila seseorang sudah mampu memenuhi kebutuhan dasar minimumnya, namun masih jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan masyarakat di sekitarnya, maka orang tersebut termasuk kategori miskin relatif. Semakin tinggi kesenjangan tingkat pendapatan antara golongan atas dengan golongan bawah maka akan semakin tinggi pula jumlah penduduk miskin. Dengan demikian, kemiskinan relatif berhubungan erat dengan distribusi pendapatan.

Ukuran kemiskinan juga bisa dihitung melalui pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan untuk mengukur kemiskinan ini mengasumsikan bahwa seseorang dan rumah tangga dikatakan miskin jika pendapatan atau konsumsi minimumnya berada dibawah garis kemiskinan. Ukuran-ukuran kemiskinan ini dihitung melalui 4 cara metode (Daerobi dkk, 2007) adalah:

1. *Head Count Index*

Head Count Index ini menghitung persentase orang yang ada dibawah garis kemiskinan dalam kelompok masyarakat tertentu.

2. *Sen Poverty Index*

Sen Poverty Index memasukkan dua faktor yaitu koefisien gini dan rasio H. koefisien gini mengukur ketimpangan antara orang miskin. Apabila salah satu faktor-faktor tersebut naik, tingkat kemiskinan bertambah besar diukur dengan S.

3. *Poverty Gap Index*

Poverty Gap Index mengukur besarnya distribusi pendapatan orang miskin terhadap garis kemiskinan. Pembilang pada pendekatan ini menunjukkan jurang kemiskinan.

4. *Foster-Greer-Torbecke Index*

Foster-Greer-Torbecke Index seperti indeks-indeks diatas, indeks FGT ini sensitive terhadap distribusi jika $a > 1$. Bagian $(Z - Y_i/Z)$ adalah perbedaan antara garis kemiskinan (Z) dan tingkat pendapatan dari kelompok ke-I keluarga miskin (Y_i) dalam bentuk suatu persentase dari garis kemiskinan.

Menurut Tambunan (2003) untuk mengukur kemiskinan ada tiga indicator yang sering digunakan di dalam banyak studi empiris, yaitu:

1. *The Incidence of Poverty*

Persentase dari populasi yang hidup di dalam keluarga dengan pengeluaran konsumsi per kapita di bawah garis kemiskinan.

2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Indeks/P1*)

Merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh nilai rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

3. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Indeks/P2*)

Indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran tentang penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Menurut BPS (2010) bahwa penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan. Garis kemiskinan makanan adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang rill dikonsumsi penduduk referensi kemudian disetarakan dengan 2100 kilo kalori perkapita perhari. Garis kemiskinan non makanan merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan data sekunder periode waktu 2002-2016. Data bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Muaro Jambi yang mencakup jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, tingkat kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan.

Data dianalisis secara deskriptif dan menggunakan uji beda t-test untuk menganalisis perbedaan tingkat kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Muaro Jambi.

Selanjutnya definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk miskin yang diambil dalam penelitian ini adalah semua penduduk miskin (dalam jiwa).
2. Tingkat kemiskinan adalah persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (dalam persen).
3. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan.
4. Indeks keparahan kemiskinan (P2) merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, semakin tinggi nilai indeks, maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah dan tingkat kemiskinan Kabupaten Batang Hari dan Muaro Jambi

Kabupaten Batang Hari menempati peringkat ke empat, jumlah penduduk miskin terbanyak di Provinsi Jambi. Berdasarkan Tabel 1. menunjukkan bahwa dalam periode 2002-2016 jumlah penduduk miskin bergerak fluktuatif. Penduduk miskin yang

terbanyak pada periode 2004 yaitu sebanyak 39.700 jiwa. Setelah itu jumlah penduduk miskin untuk periode 2004-2009 mengalami kecenderungan menurun disetiap tahunnya sebanyak 16.900 jiwa, yaitu dari 39.700 jiwa pada tahun 2005 menjadi 22.800 jiwa pada tahun 2009. Berkurangnya jumlah penduduk miskin dapat diartikan pada periode 2005-2009 pemerintah kabupaten berhasil mencari cara untuk menekan angka kemiskinan.

Pada periode 2009-2016 jumlah penduduk miskin kembali mengalami peningkatan, yaitu sebanyak 5.590 jiwa, yaitu dari 22.800 jiwa pada tahun 2009 menjadi 28.390 jiwa pada tahun 2016. Peningkatan kembali jumlah penduduk miskin Kabupaten Batang Hari pada tahun 2016 ini disebabkan anjloknya harga komoditas karet dan kelapa sawit pada tahun tersebut yang merupakan tanaman perkebunan utama di Kabupaten Batang Hari.

Tabel 1. Jumlah dan tingkat kemiskinan miskin Kabupaten Batang Hari Tahun 2002-2016

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	Tingkat Kemiskinan (%)	Perkembangan (%)
2002	37.700	19,10	-
2003	39.000	19,01	3,45
2004	39.700	19,01	1,79
2005	38.600	18,09	-2,77
2006	36.400	17,20	-5,70
2007	33.100	15,42	-9,07
2008	23.200	10,49	-29,91
2009	22.800	10,11	-1,72
2010	24.600	10,19	7,89
2011	25.600	9,56	4,07
2012	25.400	10,13	-0,78
2013	26.520	10,31	4,41
2014	27.090	10,50	2,15
2015	28.100	10,69	3,73
2016	28.390	10,79	1,03
Rata-rata	30.410	13,37	-1,43

Sumber: Batang Hari dalam Angka berbagai tahun

Selanjutnya Tabel 2 memberikan perkembangan jumlah dan tingkat kemiskinan Kabupaten Muaro Jambi. Penduduk miskin yang terbanyak pada periode 2003 yaitu sebanyak 27.000 jiwa. Pada periode 2002-2005 jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 1.300 jiwa, yaitu dari 25.200 jiwa pada tahun 2002 menjadi 26.500 jiwa pada tahun 2005. Pada periode 2005-2009 terlihat tren penurunan, meskipun jumlah penduduk miskin pada tahun 2009 mengalami sedikit kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2008. Secara relatif jumlah penurunan penduduk miskin pada periode 2005-2009 sebesar 12.100 jiwa, yaitu 26.500 jiwa pada tahun 2005 menjadi 14.400 jiwa pada tahun 2009. Berkurangnya jumlah penduduk miskin dapat diartikan pada periode 2005-2009 pemerintah kabupaten berhasil mencari cara untuk menekan angka kemiskinan.

Pada periode 2009-2016 terjadi kenaikan baik secara absolut maupun relatif angka kemiskinan meningkat kembali. Peningkatan jumlah penduduk miskin sebesar 3.120 jiwa, yaitu 14.400 jiwa pada tahun 2009 menjadi 17.520 jiwa pada tahun 2016. Dalam usaha mengurangi jumlah angka kemiskinan yang terjadi, terlebih yang dialami oleh masyarakat pedesaan Kabupaten Batang Hari dan Muaro Jambi pemerintah terus mengupayakan peningkatan lama pendidikan yang tujuannya untuk meningkatkan

sumber daya manusia di Provinsi Jambi. Peningkatan kualitas sumber daya manusia harus diiringi dengan skill yang berkualitas.

Tabel 2. Jumlah dan tingkat kemiskinan Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2002-2016

Tahun	Jumlah penduduk miskin (jiwa)	Tingkat kemiskinan (%)	Perkembangan (%)
2002	25.200	10,23	-
2003	27.000	9,98	7,14
2004	26.500	9,65	-1,85
2005	26.500	9,39	0,00
2006	25.000	8,47	-5,66
2007	21.900	7,13	-12,4
2008	13.700	4,35	-37,44
2009	14.400	4,54	5,11
2010	18.200	5,29	26,39
2011	18.900	4,98	3,85
2012	18.800	5,08	-0,53
2013	17.410	5,13	-7,34
2014	17.410	4,45	0,00
2015	18.320	4,63	5,23
2016	17.520	4,30	-4,37
Rata-rata	20.450	6,51	-1,46

Sumber: Muaro Jambi dalam Angka berbagai tahun

Berdasarkan tingkat kemiskinan, secara umum tingkat kemiskinan di Kabupaten Batang Hari lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Muaro Jambi. Rata-rata tingkat kemiskinan Kabupaten Batang Hari sebesar 13,37% dan rata-rata perkembangannya sebesar -1,43%. Sebaliknya rata-rata tingkat kemiskinan Kabupaten Muaro Jambi sebesar 6,51% dan rata-rata perkembangannya sebesar -1,46%.

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Batang Hari dan Muaro Jambi

Indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh nilai rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Nilai agregat dari poverty gap index menunjukkan biaya mengentaskan kemiskinan dengan membuat target transfer yang sempurna terhadap penduduk miskin dalam hal tidak adanya biaya transaksi dan faktor penghambat. Semakin kecil nilai poverty gap index, semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga untuk target sasaran bantuan dan program. Perkembangan indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Batang Hari dan Muaro Jambi Tahun 2002-2016 dapat dilihat pada Tabel 3 dan Tabel 4.

Secara umum indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Batang Hari dari tahun 2002-2016 berfluktuasi dengan kecenderungan menurun dari waktu ke waktu. Keadaan ini merupakan indikasi bahwa dalam periode tersebut, rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan. Secara umum indeks kedalaman kemiskinan cenderung menurun dari 2,60 pada tahun 2002 menjadi 1,29 pada tahun 2016. Akan tetapi harus dicatat terjadi peningkatan indeks kedalaman kemiskinan 2,60 menjadi 3,49 pada periode 2002-2003 yaitu sebesar 3,49. Meskipun pada periode selanjutnya kembali terjadi penurunan indeks kedalaman kemiskinan dari 2,40 tahun 2007, menjadi 2,30 tahun 2008, dan 1,00 tahun 2009. Indeks Kedalaman Kemiskinan terendah terjadi di tahun 2013 dan 2014 yaitu sebesar 0,95. Rata-rata indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Batang Hari dari tahun 2002-2016 adalah sebesar 1,87.

Tabel 3. Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Batang Hari Tahun 2002-2016

Tahun	Indeks kedalaman kemiskinan (P1)	Perkembangan (%)
2002	2,60	-
2003	3,49	2,49
2004	3,28	2,28
2005	1,89	0,89
2006	2,22	1,22
2007	2,40	1,40
2008	2,30	1,30
2009	1,00	0,01
2010	1,18	0,18
2011	1,20	0,20
2012	1,36	0,36
2013	0,95	0,05
2014	0,95	0,05
2015	1,96	0,96
2016	1,29	0,29
Rata-rata	1,87	0,78

Sumber: Batang Hari dalam Angka berbagai tahun

Selanjutnya berdasarkan Tabel 4. indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Muaro Jambi cenderung menurun dari 1,70 pada tahun 2002 menjadi 0,49 pada tahun 2016. Terjadi peningkatan indeks kedalaman kemiskinan 1,06 menjadi 1,66 pada periode 2004-2005. Meskipun pada periode selanjutnya kembali terjadi penurunan indeks kedalaman kemiskinan dari 1,66 menjadi 0,49 pada periode 2005-2016. Dapat dilihat tren penurunan indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Muaro Jambi yang menunjukkan bahwa semakin rendah indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan kehidupan ekonomi penduduk miskin semakin membaik. Rata-rata indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Muaro Jambi dari tahun 2002-2016 adalah sebesar 0,82.

Tabel 4. Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2002-2016

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Perkembangan (%)
2002	1,70	-
2003	1,18	0,18
2004	1,06	0,06
2005	1,66	0,66
2006	1,12	0,12
2007	0,90	0,10
2008	0,65	0,35
2009	0,56	0,44
2010	0,56	0,44
2011	0,43	0,57
2012	0,45	0,55
2013	0,50	0,50
2014	0,44	0,56
2015	0,61	0,39
2016	0,49	0,51
Rata-rata	0,82	0,36

Sumber: Muaro Jambi dalam Angka berbagai tahun

Secara umum, indeks kedalaman kemiskinan di daerah Kabupaten Batang Hari lebih tinggi dibandingkan di Kabupaten Muaro Jambi. Perbedaan indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Batang Hari yang relatif tinggi terjadi pada periode 2002-2004 tingginya nilai indeks kedalaman kemiskinan secara berturut-turut sebesar

2,60 ; 3,49 dan 3,28. Sedangkan indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Muaro Jambi pada periode 2002-2004 relatif lebih rendah dibandingkan Kabupaten Batang Hari dengan nilai sebesar 1,70 ; 1,18 dan 1,06. Pada tahun selanjutnya 2005-2016 untuk Kabupaten Batang Hari dan Muaro Jambi tetap mengalami fluktuasi. Meskipun secara umum di kedua Kabupaten ini cenderung mengalami tren menurun akan tetapi dapat dilihat perbedaan nilai indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Batang Hari lebih tinggi dibanding Kabupaten Muaro Jambi. Adanya perbedaan kenaikan nilai indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Batang Hari menunjukkan mayoritas masyarakat termiskin yang justru semakin menjauh di bawah garis kemiskinan. Dengan demikian secara umum dapat dikatakan bahwa jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan di Kabupaten Batang Hari relatif lebih jauh bila dibandingkan dengan Kabupaten Muaro Jambi.

Indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Batang Hari dan Muaro Jambi

Dimensi lain selain jumlah dan persentase penduduk miskin yang perlu diperhatikan adalah tingkat keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat keparahan dari kemiskinan.

Seperti yang diketahui bahwa Indeks Keparahhan Kemiskinan (*Poverty Severity Indeks P2*), memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Perkembangan indeks keparahan kemiskinan (P2) di Kabupaten Batang Hari tahun 2002-2016 dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Batang Hari 2002-2016

Tahun	Indeks Keparahhan Kemiskinan (P2)	Perkembangan (%)
2002	0,54	-
2003	1,08	0,08
2004	1,02	0,02
2005	0,32	0,68
2006	0,44	0,56
2007	0,58	0,42
2008	0,63	0,37
2009	0,16	0,84
2010	0,23	0,77
2011	0,27	0,73
2012	0,28	0,72
2013	0,14	0,86
2014	0,14	0,86
2015	0,54	0,46
2016	0,23	0,77
Rata-rata	0,44	0,54

Sumber: Batang Hari dalam Angka berbagai tahun

Secara umum indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Batang Hari cenderung menurun dari 0,54 pada tahun 2002 menjadi 0,23 pada tahun 2016. Patut dicatat terjadi peningkatan indeks keparahan kemiskinan meningkat dari 0,32 tahun 2005 menjadi 0,44 tahun 2006 setelah itu 0,58 di tahun 2007 menjadi 0,63 tahun 2008. Indeks keparahan kemiskinan terendah terjadi di tahun 2013 dan 2014 yaitu sebesar 0,14. Rata-rata indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Batang Hari dari tahun 2002-2016 adalah sebesar 0,44.

Selanjutnya berdasarkan Tabel 6 indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Muaro Jambi cenderung menurun dari 0,44 pada tahun 2002 menjadi 0,08 pada tahun 2016. Indeks keparahan kemiskinan meningkat dari 0,17 tahun 2004 menjadi 0,40 tahun 2005.

Meskipun pada periode selanjutnya kembali terjadi penurunan indeks keparahan kemiskinan dari 0,40 menjadi 0,08 pada periode 2005-2016. Rata-rata indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Batang Hari Tahun 2002-2016 adalah sebesar 0,44.

Tabel 6. Indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2002-2016

Tahun	Indeks Keparahhan Kemiskinan (P2)	Perkembangan (%)
2002	0,44	-
2003	0,20	0,8
2004	0,17	0,83
2005	0,40	0,6
2006	0,29	0,71
2007	0,21	0,79
2008	0,15	0,85
2009	0,10	0,9
2010	0,14	0,86
2011	0,07	0,93
2012	0,06	0,94
2013	0,10	0,9
2014	0,07	0,93
2015	0,13	0,87
2016	0,08	0,92
Rata-rata	0,17	0,79

Sumber: Muaro Jambi dalam Angka berbagai tahun

Secara umum, indeks keparahan kemiskinan (P2) di Kabupaten Batang Hari lebih tinggi dibandingkan di Kabupaten Muaro Jambi. Perbedaan indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Batang Hari yang relatif tinggi terjadi pada periode 2002-2004 tingginya nilai indeks keparahan kemiskinan secara berturut-turut sebesar 0,54 ; 1,08 dan 1,02. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Muaro Jambi pada periode 2002-2004 relatif lebih rendah dibandingkan Kabupaten Batang Hari dengan nilai sebesar 0,44 ; 0,20 dan 0,17.

Pada tahun selanjutnya 2005-2016 indeks keparahan kemiskinan untuk Kabupaten Batang Hari dan Muaro Jambi tetap mengalami fluktuasi. Meskipun secara umum di kedua Kabupaten ini cenderung mengalami tren menurun akan tetapi dapat dilihat perbedaan nilai indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Batang Hari relatif lebih tinggi dibanding Kabupaten Muaro Jambi.

Adanya perbedaan peningkatan indeks keparahan kemiskinan ini menunjukkan bahwa kesenjangan di antara masyarakat miskin di Kabupaten Batang Hari semakin naik dibandingkan Kabupaten Muaro Jambi. Artinya distribusi pengeluaran dan kemampuan daya beli masyarakat miskin di Kabupaten Batang Hari semakin tidak merata. Pada kelompok masyarakat miskin dengan kemampuan daya beli sangat rendah ini ada perhatian lebih dari pemerintah kabupaten (Pemkab), misalnya dengan intervensi program yang dapat meningkatkan pendapatan mereka. Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Batang Hari memiliki ketimpangan yang lebih tinggi dari ketimpangan distribusi pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Muaro Jambi.

Uji beda kemiskinan Kabupaten Batang Hari dan Muaro Jambi

Hasil uji beda rata-rata (*Independent Sample t-Test*) tingkat kemiskinan diberikan pada Tabel 7. Dapat dilihat bahwa nilai t-hitung adalah 5,742 dengan nilai signifikansi (2-tailed) dalam kolom t-test for Equality of Means adalah $0,000 < 0,01$. Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat kemiskinan Kabupaten Batanghari dengan tingkat kemiskinan Kabupaten Muaro Jambi.

Tabel 7. Uji beda (t-test) tingkat kemiskinan Kabupaten Batang Hari dan Muaro Jambi

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	T	Df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Tingkat kemiskinan	Equal variances assumed	16,880	,000	5,742	28	,000	6,86667	1,19590	4,41698	9,31635
	Equal variances not assumed			5,742	22,657	,000	6,86667	1,19590	4,39069	9,34264

Hasil uji beda rata-rata (*Independent Sample t-Test*) indeks kedalaman kemiskinan diberikan pada Tabel 8. Nilai t-hitung adalah 4,336 dengan nilai signifikansi (2-tailed) dalam kolom t-test for Equality of Means adalah $0,000 < 0,01$. Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Batanghari dengan Kabupaten Muaro Jambi.

Tabel 8. Uji beda (t-test) indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Batang Hari dan Muaro Jambi

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	T	Df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Indeks kedalaman kemiskinan	Equal variances assumed	6,993	,013	4,336	28	,000	1,05067	,24231	,55432	1,54701
	Equal variances not assumed			4,336	21,032	,000	1,05067	,24231	,54680	1,55453

Hasil uji beda rata-rata (*Independent Sample t-Test*) indeks keparahan kemiskinan diberikan pada Tabel 9. Nilai t-hitung adalah 3,221 dengan nilai signifikansi (2-tailed) dalam kolom t-test for Equality of Means adalah $0,000 < 0,01$. Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Batanghari dengan Kabupaten Muaro Jambi.

Tabel 9. Uji beda (t-test) indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Batang Hari dan Muaro Jambi

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	T	Df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Indeks keparahan kemiskinan	Equal variances assumed	8,776	,006	3,221	28	,003	,26600	,08259	,09681	,43519
	Equal variances not assumed			3,221	18,314	,003	,26600	,08259	,09269	,43931

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Rata-rata tingkat kemiskinan di Kabupaten Batang Hari selama periode Tahun 2002 – 2016 adalah sebesar 13,37%, Indeks Kedalaman Kemiskinan sebesar 1,87%, dan Indeks Keparahan Kemiskinan sebesar 0,44%. Pada periode yang sama, rata-rata tingkat

kemiskinan di Kabupaten Muaro Jambi sebesar 6,51%, dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan sebesar 0,82%, dan Indeks Keparahan Kemiskinan sebesar 0,17%.

Terdapat perbedaan yang signifikan antara Tingkat Kemiskinan Kabupaten Batang Hari dengan Kabupaten Muaro Jambi. Demikian juga terdapat perbedaan yang signifikan antara Indeks Kedalaman Kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan antara Kabupaten Batang Hari dengan Kabupaten Muaro Jambi.

Saran

Diharapkan Pemerintah Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Muaro Jambi lebih memperhatikan masalah kemiskinan dan harus mengambil kebijakan yang tepat untuk memfokuskan pengentasan kemiskinan agar dapat menekan angka kemiskinan di kedua Kabupaten ini terutama di Kabupaten Batang Hari. Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang. Oleh karenanya pemerintah pada kedua kabupaten harus meningkatkan sumber daya penduduk miskin agar memiliki sumber daya dalam jumlah yang memadai dan kualitasnya tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alborno, M.A. dkk, (2007). *Menuju Kesejahteraan dalam Masyarakat Hutan: Buku Panduan untuk Pemerintah Daerah*, Bogor: Cifor.
- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Case, K. E., Fair, R. C., (2010). *Prinsip-prinsip Ekonomi*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Daerobi, A., dkk (2007). Dampak Pengembangan Sektor Pertanian Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Jawa Tengah. *Region*, 2(1). 1-24.
- Delis, A., Mustika, C., Umiyati, E., (2015). Pengaruh FDI terhadap kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. *Jurnal Paradigma Ekonomika*. 10(1), 231 - 245
- Gonner, C., Cahyat, A., Haug, M., Godwin L., (2007). *Menuju Kesejahteraan: Pemantauan Kemiskinan di Kutai Barat, Indonesia*. Bogor: Cifor.
- Hidayat S, (2010). *Pengantar Umum Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Verivikatif*. Pekanbaru: Suska Pres.
- Jhingan, M.L. (2008). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Kuncoro, M. (2000). *Metode Kuantitatif (Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi)*, Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, Yogyakarta.
- Kuncoro, (2010). *Masalah, Kebijakan dan Politik Ekonomika Pembangunan*. Jakarta: Erlangga
- Misbahuddin & Iqbal H. (2013). *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Edisi Kedua. Bumi Aksara: Jakarta.
- Suharto, S., (2010). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Reflika Aditama, Bandung.
- Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan social dan Pekerjaan Sosial*, Bandung : PT Rafika Aditama.
- Syaparuddin, Artis, D., Nurhayani. (2015). Analisis Strategi Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus di Kabupaten Batang Hari). *Jurnal Paradigma Ekonomika*. 10(1). 261- 274
- Tambunan, T.H. (2003). *Perekonomian Indonesia : Beberapa Masalah Penting, Jakarta : Galia Indonesia. 2003.*
- Todaro, M.P, & Smith, S.C. (2016). *“Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Kedelapan”*. Jakarta: Erlangga.